

**KUASA WACANA KEBUDAYAAN BUGIS MAKASSAR DALAM PILKADA DI KABUPATEN
PINRANG
(STUDI KASUS: IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SIPAKATAU, SIKAINGE' DAN SIPAKALEBBI
DALAM MEMOBILISASI MASSA
PADA PILKADA PINRANG TAHUN 2013)**

FITRIANI SARI HANDAYANI RAZAK
Universitas Al-Asy'ariyah Mandar (UNASMAN)
Sulawesi Barat
Email: fitriani90@gmail.com

Abstrak

This article outlines the existence of cultural values in shaping behavior of political elites in seizing power or in election campaign process in Pinrang in 2013. In one hand, some people romantically treat culture as heritage for the sake of today and future society to realize and for functioning as a guide in establishing an ideal pattern of community life. On the other hand, there are some deviating practices, which have never been revisited.

Kata Kunci: *Elit Lokal, Kontestasi, Kuasa Wacana, Arena Pilkada, sipakainge, sipakalebbi dan sipakatau.*

A. Pengantar

Kalangan yang memperlakukan kebudayaan sebagai warisan yang patut dilestarikan oleh masyarakat berasumsi bahwa kebudayaan merupakan basis pendefinisian identitas dan pembeda dari kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu kajian mengenai antropologi orang bugis yang tertuang dalam sebuah disertasi yang berjudul Latoa “Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis”. Mereka berpendapat bahwa penerimaan manusia atas suatu kekuasaan, ketaatan dan respon yang diberikannya kepada suatu bentuk kepemimpinan, serta sifat-sifat kepemimpinan yang ditaatinya, dikuasai oleh suatu sikap hidup, berdasarkan suatu sistem nilai yang hidup dalam kebudayaannya. Mereka berpendapat begitu karena dibutuhkan pengetahuan sebanyak mungkin

tentang anasir yang lekat kepada kesadaran budaya orang Indonesia sendiri. Analisis itu terkandung dalam wujud kebudayaan, berupa nilai-nilai, norma-norma dan sejumlah peranan serta kaidah kehidupan yang tersimpul dalam aspek ideal dari kebudayaan. Adapun bentuk-bentuk tingkah laku dan tata cara manusia melakukan interaksi kehidupannya, tersimpul dalam aspek kelakuan dari kebudayaan. Wujud kebudayaan itu, berakar menjangkau masa silam baik yang jauh maupun yang dekat. Adalah menjadi tugas tiap generasi untuk menjaga kesinambungan hidup dari wujud kebudayaan itu, terutama agar terpeliharanya keserasian. Lebih lanjut tiap-tiap aspek kehidupan dari wujud kebudayaan yang terdapat pada suatu bangsa, baik yang berupa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya maupun berupa ilmu-ilmu serta kepandaian-kepandaian yang dimilikinya disamping berupa agama-agama yang dipercayainya, secara pasti menentukan berbagai bentuk sikap dan tindakan tiap orang dari bangsa dan persekutuan hidup itu.¹ Inilah alasan mengapa kebudayaan itu merupakan landasan atau dasar dalam mendefinisikan identitas suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya kebudayaan itu direproduksi untuk membentuk perilaku manusia yang taat akan aturan-aturan serta norma-norma yang berlaku dalam struktur masyarakat.

Perilaku yang berkembang di masyarakat merupakan pola hidup yang dibentuk melalui ajaran-ajaran orang tua yang diturunkan secara turun temurun kepada anak cucu mereka. Setiap perilaku yang tersirat tentunya mengandung nilai-nilai moralitas yang sesuai dengan budaya yang tumbuh di masyarakat. Pengetahuan atas nilai-nilai kebudayaan yang berkembang di masyarakat dan bagaimana perilaku individu itu terbentuk merupakan pola hidup yang dibentuk melalui ajaran-ajaran orang tua yang diturunkan secara turun temurun kepada anak cucu mereka². Selain dari ajaran

¹ Lihat Mattulada, 1985, Latoa "Satu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis". Hlm:1-3.

² Berkaitan erat dengan pemahaman pokok budaya menurut *Kroeber* dan *Klockhohn* berdasarkan *definisi historis* yang cenderung melihat budaya sebagai warisan yang dialih-turunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Serta *definisi normatif* yang mengambil dua bentuk: *Pertama*, budaya adalah aturan atau jalan hidup yang membentuk pola-pola perilaku dan tindakan yang konkret. *Kedua*, menekankan peran gugus nilai tanpa mengacu pada perilaku.

keluarga sebagai intitusi terkecil dalam memperkenalkan atau mentransformasikan pengetahuan terhadap anaknya, kondisi lingkungan ataupun sekolah yang menjadi tempat belajar sebagai media dalam mentrasformasikan pengetahuan termasuk nilai-nilai kebudayaan tersebut. Berbagai penelitian terhadap kebudayaan Bugis Makassar telah dilakukan oleh beberapa ahli antropolog.

Dalam peneliti sebelumnya yang bukan asli seperti R. Siti Zuhro. Dia mengemukakan bahwa nilai budaya dalam masyarakat di Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan konsep kekeluargaan yang terjaga hingga masa kini antara lain nilai *sipakatau*, *sikalebbi* dan *sipakainge'*, nilai-nilai ini dapat ditemukan pada institusi seperti birokrasi. Nilai *sipakatau* terkait dengan bagaimana individu menghargai satu sama lain, ataupun dikenal dengan istilah memanusiakan manusia. Dimana kita dituntut untuk saling menghargai hak dan kewajiban satu sama lain. Antara sang penguasa dan yang dikuasai diharapkan adanya sikap saling menghargai dan menyokong satu sama lain, karena tidak dapat dipungkiri bahwa sang penguasa tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat bawah dalam memenuhi kepentingannya, serta masyarakat bawah pun membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan kesejahteraan bagi mereka.

Salah satu contoh praktek perpolitikan yang ditulis oleh Andi Faizal Bakti³ memberikan gambaran bagaimana sang pemimpin⁴ tetap eksis di mata masyarakat, sehingga pemimpin ini yang notabene bangsawan mampu mempertahankan kekuasaannya di tengah tekanan arus globalisasi dan berbagai kepentingan di masyarakat. Proses mempertahankan kekuasaannya tidak lain karena sang bangsawan ini memiliki modal berupa harta kekayaan (modal ekonomi), sehingga dia mampu menjangar relasi sosial. Orang-orang yang senantiasa dia bantu tentunya memiliki hutang batin kepada sang bangsawan ini. Praktek ini sangat dekat dengan sistem

³ Lihat: Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken (eds), 2007, Politik Lokal di Indonesia. Hlm 491-504.

⁴ Dalam tulisan ini Andi Faizal Bakti lebih memfokuskan pada kaum bangsawan di daerah Wajo, dan bagaimana kaum bangsawan yang dia sebut *Puang* ini mampu mempertahankan kekuasaannya sejak zaman orde baru hingga reformasi saat ini.

patron-klien dimana sang bangsawan sebagai patron senantiasa memberikan bantuan kepada masyarakat (klien) namun dibalik itu semua ada timbal baliknya berupa jasa ataupun dukungan suara. Ketika sang bangsawan ini maupun keluarganya terjun dalam panggung politik seperti pemilihan, maka sang klien pun secara tidak langsung memiliki kewajiban untuk mendukung sang bangsawan ini. Atas dasar saling tolong menolong (*sipakatau*) baik bangsawan yang notabene merupakan elit lokal serta masyarakat telah memreproduksi nilai *sipakatau* dalam kehidupan mereka. Pasca terpilihnya bangsawan ini tidak menjadikannya gelap mata, dia senantiasa menjaga relasi sosialnya dengan baik, dengan memberikan jabatan ataupun kedudukan kepada kroni-kroninya. Tanpa melihat kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki oleh kroni-kroninya, hal ini merupakan wujud dari hak preogratif sang pemimpin dalam menentukan pejabat-pejabat di tingkat lokal meski telah menggeser makna *sipakatau* ataupun tolong menolong antar sesama manusia.

Hal yang sama dikatakan A. Rahman Rahim dari kajiannya tentang nilai-nilai kebudayaan bugis dalam kehidupan masyarakat bugis dan secara umumnya masyarakat Sulawesi Selatan. Yang mereka kedepankan dalam kajian adalah spesifikasi nilai budaya yang terkandung dalam *paupau rikadong*⁵. Kajian mereka mengesankan bahwa terdapat nilai-nilai lain dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan masyarakat yakni:

1. **Nilai Kejujuran (*Alempurang*)**, *alempurang* memiliki arti jalan lurus tidak berbelok ataupun berlawanan arah. *Alempurang* ini diasumsikan sebagai kejujuran karena kejujuran berasal dari kata ‘jujur’ yang artinya berkata benar sesuai dengan fakta dan data yang ada. Zaman sekarang kejujuran jarang sekali kita temukan hal ini dikarenakan berbagai kepentingan yang dikuasai oleh hawa nafsu belaka. Kejujuran

⁵ *Paupau rikadong* berasal dari kata *paupau*, yang dalam bahasa bugis berarti “dogeng, cerita, kisah” dan *rikadong* yang berarti “menganggukkan kepala, mengyakan, menyetujui”. Jadi *paupau rikadong* kurang lebih berarti “ceritera yang disetujui, diyakan isinya”. Jadi dapat disimpulkan bahwa *paupau rikadong* merupakan cerita rakyat yang telah disetujui, disepakati oleh masyarakat bugis. (A.Rahman Rahim; 2011:xii).

merupakan tindakan sesuai dengan kebenaran yang dijunjung tinggi berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat.

2. **Kecendekiaan (*Amaccang*)**, kemunculan orang pintar saat ini tidak dapat dipungkiri tak terhitung jumlahnya tetapi yang memanfaatkan kepintarannya bagi kemaslahatan orang banyak masih sedikit, hal ini disebabkan ketika orang pintar ini tidak memikirkan jalan keluar suatu permasalahan yang sedang dihadapi dalam kehidupan orang bukan menambah masalah ataupun beban yang dihadapi masyarakat. *Amaccang* yang berasal dari kata “*acca*” yang artinya “pintar, cerdas atau dengan kata lain orang yang memiliki pengetahuan”. Sedangkan *amaccang* itu sendiri yang berarti kecendekiaan berarti bagaimana orang memanfaatkan kecerdasannya atau pengetahuannya itu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Bukan menambah beban bagi masyarakat ataupun menggunakan pengetahuannya itu untuk menipu masyarakat. Orang yang dapat dikategorikan *amaccang* ini seperti para pejabat yang memiliki pengetahuan senantiasa mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga pejabat ini membuat kebijakan berdasarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sedangkan pejabat yang pintar tetapi tidak memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki ini belum tentu dikategorikan sebagai *amaccang* ketika para pejabat yang pintar ini tidak berbuat apa-apa dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat.

3. **Kepatutan (*Asitinajang*)**, terkait dengan pantas atau tidak pantasnya kita menerima sesuatu itu berdasarkan kapabilitas kita. Misalnya penghargaan itu diberikan kepada orang yang patut mendapatkannya berdasarkan kinerja kerjanya. Tidak dapat dipungkiri setiap orang membutuhkan penghargaan atas kerjanya agar lebih semangat dalam bekerja.

4. **Keteguhan (*Agettengeng*)**, hal ini berkaitan dengan apa yang diyakini dan yang menjadi kepercayaan selama ini. Ketika sesuatu hal telah dijadikan keyakinan maka seseorang akan memegang teguh keyakinan dan pendiriannya itu walaupun banyak hal yang berusaha untuk meruntuhkan keyakinannya. Orang yang teguh akan

pendirian ini tentunya memegang prinsip apa yang diyakini merupakan kebenaran yang mutlak.

5. **Usaha (reso)**, untuk mendapatkan apa yang diinginkan tidak terlepas dari seberapa besar usaha kita dalam mendapatkan keinginan kita. Bekerja secara ikhlas dan mengharapkan ridho sang Ilahi merupakan tuntutan kita dalam menggapai keinginan kita. Usaha yang disertai dengan nilai kejujuran, pengetahuan serta keteguhan tentunya akan mendatangkan keberkahan. Dan hasil usaha itu dapat dinikmati tanpa harus mengorbankan orang lain ketika nilai kejujuran itu dijadikan pedoman dalam bekerja.

6. **Harga Diri, Malu (Siri)**, masyarakat bugis dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi harga diri ataupun rasa malu itu, dimana ketika ada orang lain yang mencoba mencabik-cabik harga diri mereka maka akan terjadi amukan atas dasar *siri'* (malu) karena merasa harga diri mereka telah diinjak-injak. Seperti contoh ketika seseorang mempermalukan salah satu anggota dalam masyarakat bugis maka semua keluarga yang dipermalukan ini akan turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi keluarganya atas dasar harga diri mereka telah diinjak-injak dan solidaritas keluarga dalam masyarakat bugis. Kebanyakan kasus perkelahian yang terjadi di Sulawesi Selatan ini berkaitan dengan mempertahankan harga diri dan *siri'* ini tidak sedikit memakan korban karena konflik yang terjadi.

Dalam rangka demokrasi, pembangunan atau hal-hal sejenisnya, persoalan yang lebih penting untuk ditelaah bukanlah apa rumusan nilai-nilai lokal tersebut, melainkan seberapa kuat nilai-nilai tersebut menjerat perilaku masyarakat. mengapa hal ini penting dilakukan? Nilai-nilai lokal tidak bekerja dalam vacuum. Ada begitu banyak nilai-nilai lain yang beredar dan secara diam-diam juga menjadi acuan berperilaku. Sebagai contoh, sistem nilai budaya tadi membentuk tali kekerabatan diantara masyarakat di Sulawesi Selatan tak terkecuali di Kabupaten Pinrang. Sistem kekerabatan ini terlihat dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya yang saling tolong menolong satu sama lain. Kebudayaan yang diwariskan oleh para leluhur inilah yang

senantiasa dijaga oleh generasi saat ini, mengingat warisan kebudayaan ini membentuk pola tingkah laku masyarakat bugis di Kabupaten Pinrang.

Pada saat yang sama, adanya kampanye (advokasi) menggunakan bingkai anti nepotisme. Dari santerinya wacana anti nepotisme, bisa diantisipasi adanya kegoncangan atas nilai kekerabatan. Pewacanaan akan nilai-nilai kebudayaan ini dilihat sebagai bagaimana kebudayaan ini tumbuh dalam pikiran manusia serta bekerja dalam membentuk perilaku individu seperti yang dijelaskan oleh *Michel Foucault* (dalam Mudji sutrisno & Hendar Putranto (ed);150-157) tentang diskursus dan kekuasaan. Foucault berpikir bahwa kekuasaan itu tidak terpusat melainkan tersebar dimana-mana, dan oleh karenanya tersebar hingga ke pelosok mikro dalam struktur masyarakat.

Nilai-nilai kebudayaan asli semakin dipertanyakan eksistensinya ditengah kepentingan-kepentingan para elit, baik kepentingan kelompok hingga kepentingan pribadi. Lebih dari itu, banyak praktek politik yang dibungkus dengan wacana-wacana yang tidak bersumber dari lokalitas. Sebagai contoh, sebelum maupun setelah demokrasi di terapkan di Indonesia nilai budaya lokal *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* sangat dijunjung tinggi oleh para elit politik, senantiasa menjaga solidaritas dan kerukunan antar masyarakat. Pasca demokrasi diterapkan di Indonesia yang memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia politik, ditandai dengan adanya kompetisi dalam meraih kekuasaan dalam mewujudkan kepentingannya, dan dalam perwujudan kompetisi kekuasaan tersebut nilai budaya lokal patut menjadi kajian, sejauh mana hal tersebut menjadi acuan perilaku elit politik. Namun di sisi lain wacana elit ini seringkali dimanfaatkan oleh para elit untuk mendapatkan kepentingannya, sehingga wacana akan nilai *siapakatau*, *sipakainge'* dan *sipakalebbi* direproduksi atau mengalami pergeseran makna berdasarkan kepentingan elit lokal tersebut. wacana nilai-nilai (baca: *siapakatau*, *sipakainge'* dan *sipakalebbi*) tersebut dimaknai oleh elit lokal untuk menjaga kekuasaannya yang sebenarnya makna tersebut berrbeda dengan praktek sesungguhnya. Jika ditelaah lebih dalam praktek akan nilai-nilai tersebut menjadi kabur pada saat ini.

B. Pewacanaan *sipakatau*, *sipakalebbi* dan *sipakainge'* sebagai pemingkai praktek politik Lokal sebagai Kontestasi Wacana

Tulisan ini membahas bagaimana pewacanaan atas nilai-nilai budaya lokal yang melekat pada masyarakat Bugis Makassar khususnya masyarakat Pinrang. Telaah dilakukan dengan meminjam pemikiran Foucault tentang wacana. Wacana akan nilai-nilai lokal (baca: *sipakatau*, *sipakalebbi* dan *sipakainge'*) memiliki kekuasaan bagi kaum yang mengumbarnya sebagai suatu kebenaran yang mampu menghipnotis masyarakat dalam mendisiplinkan tubuh mereka untuk senantiasa patuh akan aturan-aturan serta norma-norma yang berlaku. Melalui telaah ini akan diungkap bagaimana proses adu kuasa dibalik pewacanaan nilai-nilai budaya lokal membentuk perilaku manusia atau *docile body* (tubuh yang patuh). Dalam rangka itu, telaah dibagi menjadi beberapa hal yang dijadikan dasar.

Pertama, tulisan ini beranjak dari pemikiran bahwa kekuasaan itu tidak terpusat pada lembaga/institusi-institusi politik ataupun para aparatus Negara seperti yang diyakini oleh para pengikut Hobbes. Tetapi kekuasaan itu dipahami sebagai makhluk yang tersebar seperti yang dikonsepsikan oleh Foucault. Untuk itu dalam tulisan ini menggunakan kerangka pikir yang meminjam konsep pokok dari Foucault tentang praktik kekuasaan, *discourse*, serta konsepsi Bourdieu tentang *habitus*, dan *field* (arena).

Lahirnya diskursus di ranah panggung politik lokal tercermin melalui wacana akan nilai-nilai kebudayaan (baca: *sipakatau*, *sipakalebbi* dan *sipakainge'*) yang didengungkan oleh para elit dalam kampanyenya yang menjamin suatu kebenaran yang dapat membawa perubahan pembangunan lebih baik di ranah pemerintahan ketika sang elit yang terpilih memimpin. Wacana tersebut merupakan mantra untuk menghipnotis masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Reproduksi atas pewacanaan nilai-nilai kebudayaan ini menciptakan *habitus* dalam struktur masyarakat Kabupaten Pinrang. Adapun pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan arena (*field*) pertarungan sengit para elit dalam merebut kekuasaan. Dengan menggunakan modal

(*capital*) berupa pengetahuan, kekayaan (ekonomi), keturunan/gen, hingga relasi sosial dikerahkan para elit bahwa setiap ucapan yang diumbarinya pada saat kampanye dapat dibuktikan melalui tindakan/ perbuatan setelah mereka memimpin kelak. Selain itu catatan perjalanan hidup mereka (baca: elit lokal) sesuai dengan *pangadêrrêng* yang senantiasa dijadikan pedoman bagi masyarakat Bugis Makassar dalam menentukan hal baik dan buruk serta yang normal dan abnormal.

Kedua, karena tulisan ini melihat proses kerja politik sehari-hari yang dimulai dari hal yang terkecil yakni individu sebagai *basic*. Untuk itu tulisan ini meminjam beberapa konsep dari Foucault dan Bourdieu diyakini memberikan kontribusi dalam menjelaskan proses terbentuknya kuasa wacana atas nilai-nilai budaya lokal dalam membentuk perilaku manusia terutama para elit di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Pinrang. Tulisan ini ingin mengungkapkan reproduksi wacana atas nilai-nilai lokal yakni *siopakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* oleh para elit lokal serta bagaimana cara kerjanya dalam menguasai pikiran masyarakat dalam mendisiplinkan perilaku mereka.

Menurut Foucault (1926-1984), kekuasaan tidak terpusat pada instansi-instansi atau lembaga-lembaga pemerintah serta para aparatur Negara, tetapi kekuasaan itu tersebar menyentuh ranah kehidupan masyarakat hingga skala mikro. Kekuasaan lebih diperlihatkan dalam taktik atau strategi, dari pada sebagai sumberdaya untuk dipakai. Dalam konteks inilah, pewacanaan hadir sebagai praktek politik. Pewacanaan akan nilai-nilai budaya lokal mengisyaratkan bekerjanya kekuasaan dalam membentuk dan mengatur perilaku individu. Aturan berdasarkan nilai-nilai ataupun norma-norma yang ada dalam struktur masyarakat ini sebagai upaya dalam menciptakan tubuh yang patuh (*docile body*) para aktor yakni elit.

Pengetahuan akan nilai-nilai kebudayaan ini masih bertahan hingga saat ini karena adanya proses transformasi wacana tentang nilai-nilai kebudayaan dari masa ke masa. Wacana akan nilai-nilai kebudayaan (baca: *sipakatau*, *sipakalebbi* dan *sipakainge*) yang ditransformasikan oleh para elit lokal diyakini memiliki kekuasaan serta

merupakan suatu kebenaran mutlak dan berhak untuk mendapatkan basis massa. Berbagai macam bentuk pengoperasian kekuasaan dalam pandangan Foucault baik dari yang jelas maupun yang kasat mata, termasuk dalam praksis kultural pada umumnya yaitu diskursus. Diskursus (*discourse*) adalah cara menghasilkan pengetahuan, beserta praktik sosial yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial tersebut, serta saling keterkaitan di antara semua aspek ini⁶. Seperti yang dikatakan dalam *The Archeology of Knowledge* (1976) atau yang kita kenal sebagai Arkeologi Pengetahuan yang memberikan penjelasan *rigid* atas kesatuan-kesatuan diskursus, formasi-formasi diskursif, kejanggalan, eksterioritas, akumasi, serta deskripsi arkeologis. Dengan menggunakan konsep-konsep seperti “retakan, ambang, batas, seri dan transformasi” yang menggantikan konsep-konsep sebelumnya yakni “tradisi dan pengaruh”.

Dimana tradisi seringkali ditemukan dalam kehidupan masyarakat, meski peristiwa berbeda terjadi seringkali dihubungkan dengan sejarah, pengetahuan akan sejarah meng*hegemoni* kita untuk mematuhi norma-norma yang berlaku pada masa lalu. Tradisi memungkinkan kita mengisolasi “yang baru” di tengah-tengah latar sejarah yang telah permanen dan dapat memindahkan muatan-muatan yang terdapat di dalam “yang baru” tadi kepada orisinalitas, kelihaihan dan putusan beberapa individu tertentu yang melahirkan tradisi itu dulunya. Selanjutnya konsep mengenai pengaruh (*influence*) berkontribusi dalam memudahkan kita untuk menganalisa bagaimana proses penyebaran dan komunikasi. Pengaruh nilai-nilai kebudayaan ini dapat dilihat dari proses komunikasi dan perilaku individu terhadap individu lain.

Konsep transformasi atas nilai-nilai kebudayaan ini dapat ditunjukkan dengan eksistensi kebudayaan ini dan bagaimana nilai-nilai ini tetap bertahan dalam struktur masyarakat seperti kemampuan adaptasi, inovasi, mempertahankan hubungan-hubungan antar elemen-elemen berbeda, sistem asimilasi dan pertukaran yang ada.

⁶ Michel Foucault, 2011, *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Michel Foucault*. Hlm:9.

Meski terdapat perpaduan (koherensi) antara yang terjadi di masa kini dengan yang telah terjadi dalam rentan waktu yang berbeda. Ketika perilaku individu menunjukkan hal yang berbeda dari nilai-nilai yang dipahami masyarakat, tidak serta merta diklaim sebagai perilaku *abnormal*, tetapi hal ini justru diterima sebagai perilaku yang baru oleh individu tersebut.

Lebih lanjut konsep analisa wacana dan kekuasaan Foucault menjelaskan tentang *épistémè*. Dengan menunjukkan peristiwa yang tabu, kegilaan dan ketidakbenaran terjadi dalam suatu zaman atau masyarakat. Foucault memperkenalkan hubungan antara wacana, pengetahuan dan kekuasaan. Di mana terdapat hubungan yang erat antara bahasa dan realitas dalam *épistémè*. Meski tidak transparan, bahasa bukan cerminan dari realitas, tetapi ditentukan oleh *épistémè*. Bahasa menyampaikan realitas yang telah dibentuk oleh *épistémè*. Wacana berkaitan dengan bagaimana menghasilkan produk bahasa dan pengetahuan dalam mengatur perilaku individu dalam praktik sosialnya. Untuk membuat regulasi terhadap perilaku individu, terdapat alat berupa kekuasaan di setiap proses bekerjanya wacana ini dalam membentuk perilaku tersebut.

Dalam rangka menyelidiki wacana-wacana tersebut, Foucault menggunakan tiga konsep yang saling berkaitan yakni: *positivitas (positivity)*, *apriori historis (historical apriori)*, dan *arsip (archive)*. *Positivitas* suatu wacana atau ilmu adalah apa yang menjadi penanda (*significant*) untuk membedakan atau menyamakan persepsi dalam suatu wacana yang dikemukakan seseorang dengan orang lain dalam rentan waktu tertentu. *Apriori historis* artinya keseluruhan atau syarat-syarat yang menentukan suatu wacana terdiri dari wujud diskursus itu sendiri. *Arsip* adalah sistem pernyataan-pernyataan yang dihasilkan dapat berupa dokumen-dokumen ataupun aturan-aturan yang dibentuk oleh berbagai *positivitas* sesuai dengan *apriori historis* masing-masing⁷.

⁷ Lihat Mudji Sutrisno & Hendar Putranto (ed), *Teori-teori Kebudayaan*, Yogyakarta, Kanisius, 2005. Hlm: 152-153.

Foucault telah menunjukkan adanya praktik kekuasaan yang terjadi di ranah mikro kehidupan masyarakat. Dengan memberikan definisi bahwa kekuasaan itu tersebar, tidak dapat dilokalisasi, merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan, memberi struktur kegiatan-kegiatan, tidak represif tetapi produktif, serta melekat pada kehendak untuk mengetahui. Praktik kekuasaan yang terjadi inilah merupakan bentuk beroperasinya wacana secara tidak kasat mata tetapi memiliki kekuatan yang muncul di berbagai permukaan. Gagasan mengenai kekuasaan dalam karya Foucault merupakan jawaban atas persoalan bagaimana dan mengapa formasi-formasi diskursif berubah. Pandangan mengenai otonomi kebudayaan dalam kaitannya dengan hubungan internal dalam formasi-formasi diskursif yang akhirnya tergusur seiring dengan bergesernya penekanan menuju relasi kekuasaan sebagai sendi terpenting. Hal itu lantas menjadikan pengetahuan sebagai wahana bagi strategi, pergulatan, serta konflik demi kekuasaan. Gagasan Foucault tentang kekuasaan disipliner merupakan representasi dari upaya pembacaan teoritis kekuasaan atas modernitas.

Dalam bekerjanya kekuasaan tersebut tidak selamanya berupa hukuman fisik secara langsung, tetapi dapat berupa norma-norma atau aturan-aturan yang mengikat struktur masyarakat. Norma-norma atau aturan-aturan ini meski tidak kasat mata tetapi memiliki kemampuan untuk menciptakan *normalisasi* atau *regulasi tubuh* (dikutip Mudji Sutrisno & Hendar Putranto). Normalisasi tersebut merupakan dampak dari kebenaran atas pengetahuan yang diperoleh dari instansi terkecil sebagai praktik pendisiplinan (*disciplinary institutions*) seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat dalam bentuk mikro yakni keluarga. Di mana keluarga memiliki tanggung jawab dalam penyebaran nilai-nilai kebudayaan ini, hal ini berimplikasi terbentuknya kepatuhan atas nilai-nilai yang disebarluaskan. Selain keluarga lembaga pendidikan juga berperan dalam penyebaran nilai-nilai kebudayaan ini seperti sekolah yang mengajarkan tatanan nilai yang dianut masyarakat. Sebagai contoh adanya mata pelajaran yang berbasis kedaerahan memiliki otonomi dalam mengajarkan peserta didik tentang adat istiadat,

bahasa daerah, nilai-nilai budaya lokal itu sendiri dan sebagainya yang berbau khas kedaerahaan.

Disciplinary institutions tidak terelakkan mengandung unsur kekuasaan hingga dalam praktiknya semua individu berkewajiban untuk mengikuti norma atau aturan tersebut agar tidak berbeda dengan yang lain. Praktik ini memberikan batasan individu dalam bertindak dan berperilaku karena adanya *panopticon* sebagai bentuk pengawasan atas dirinya. Ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan bugis Makassar dianggap sebagai pembangkang dan bisa jadi orang tersebut didiskriminasi oleh kelompok masyarakat lain sebagai bentuk hukuman.

Disini tercermin bagaimana nilai-nilai kebudayaan ini meski sebagai wacana memiliki kekuasaan tersendiri dalam membentuk perilaku individu atau para aktor. Pembentukan perilaku ini merupakan praktik dari pendisiplinan atau normalisasi tubuh. Bagaimana tubuh diatur, perilaku diperintah serta pembentukan jati diri merupakan proses pemerintahan atas diri, pemerintahan atas orang lain, dan pemerintahan Negara, bagi Foucault pemerintahan terkait dengan “*the conduct of conduct*” (penguasaan perilaku) (dikutip George Ritzer, hlm: 1056). Praktik ini merupakan strategi politik dalam menentukan atau menciptakan ruang/arena perpolitikan yang baik dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam struktur masyarakat.

C. Reproduksi Wacana *Sipakatau*, *Sipakalebbi* dan *Sipakainge*'

Lebih lanjut, Pierre Bourdieu (1930-2002) pemikir Prancis yang terkemuka di penghujung abad ke-20 dimana pemikirannya mengkritik pemikiran para Marxists yang menyatakan bahwa masyarakat dapat dianalisis secara sederhana melalui kelas-kelas dan ideologinya (Choirul Mahfud, 2009:278). Dengan memperkenalkan konsep baru dalam ilmu sosial yakni *habitus*, *field* dan *capital*, mencoba menjelaskan adanya pengaruh sejarah yang ada dalam diri individu dalam pembentukan jati diri seseorang yang membutuhkan ruang untuk memenuhi kepentingannya dibutuhkan modal sebagai dasar memperjuangkan kepentingan tersebut. Praktik memperjuangkan

kepentingan ini tidak terlepas adanya kekuasaan yang tidak kasat mata merasuki pribadi seseorang.

Kampanye merupakan salah satu strategi arena yang digunakan para aktor/elit untuk mendapatkan dukungan rakyat sebagai proses menuju kursi kepemimpinan dalam panggung politik. Lebih lanjut, Bourdieu menjelaskan tiga langkah dalam proses menganalisis suatu medan. *Pertama* mencerminkan keunggulan medan kekuasaan ialah melacak hubungan setiap medan spesifik ke medan politis. *Kedua* memetakan struktur objektif relasi-relasi antarposisi-posisi yang ada di dalam medan itu. *Ketiga* menentukan hakikat habitus para agen yang menduduki aneka tipe posisi di dalam medan itu.

Habitus berasal dari bahasa latin yang mengacu pada kondisi, penampakan atau situasi yang tipikal atau habitual, khususnya pada tubuh (Richard Jenkis, 2004:107). Sebagai sesuatu yang tampak dari individu *habitus* cenderung mempraktikkan apa yang menjadi pemahamannya selama ini tentunya hal itu tidak terlepas dari sejarah dan pengetahuan individu.

Habitus memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: *Pertama* sebagai landasan atau basis individu dalam menggunakan nalar atau logikanya dalam menganalisis sesuatu sebagai tolak ukur dalam memberikan persepsi terhadap sesuatu tersebut berdasarkan data sejarah dan pengetahuan yang dimilikinya. *Kedua* sebagai bentuk apresiasi dan wujud interaksi antara individu dengan lingkungannya misalnya bagaimana individu tersebut berbicara, bertingkah laku, dan melihat sesuatu. *Ketiga* landasan atau pijakan individu dalam beraksi atau melakukan tindakan berdasarkan apa yang dipahami, diketahui oleh kepala (pikiran) yang dipengaruhi lingkungan dan berdasarkan pengalaman yang dialaminya.

Sebagai bagian yang tidak terlepas dari bagian tubuh, pikiran dan kehidupan individu ini sebagai kausalitas atas pemahaman yang telah meresap dalam diri seseorang yang terwujud dari kebiasaan atau ciri khas seseorang dalam bertindak. Meski telah menjadi ciri khas seseorang, *habitus* bukan berarti menjadi suatu struktur

yang tetap dan tidak berubah tetapi lebih disesuaikan atas kondisi dan kepentingan individu. Sejarah dan pemahaman atas nilai-nilai budaya lokal meski telah ada dalam pikiran masyarakat bugis Makassar termasuk masyarakat Pinrang tercermin bagaimana individu atau para aktor memperlakukan atau berinteraksi dengan orang lain.

Wujud dari nilai *Sipakatau* yang dipahami oleh masyarakat bugis Makassar itu terlihat ketika seorang pemimpin/raja memperlakukan bawahannya/budak/*atah* dengan tidak semena-mena. Meski sebagai raja yang memiliki kekuasaan penuh hal ini tidak menjadikan raja tersebut murka dan tidak menghargai bawahannya, justru seorang pemimpin berkewajiban untuk memperlakukan bawahannya dengan layak. Contohnya dengan memberikan pekerjaan atau menyewakan tanah miliknya⁸ kepada para bawahan/budak/*atah* ini. Meski terlihat bagaimana praktik patron-klien itu terjadi tidak menjadikan para patron ini bertindak semena-mena terhadap sang klien, sehingga para klien ataupun bawahan ini senantiasa menghormati para raja/pemimpinnya karena mendapatkan perlakuan yang baik serta penghargaan dari sang pemimpin/penguasa ini. Pemahaman akan nilai-nilai seperti ini yang ada dalam isi kepala para aktor/elit di Kabupaten Pinrang dapat dijadikan landasan dalam bersikap. Namun hadirnya istilah *serangan fajar* dan *money politik* merupakan pola tingkah laku atau kebiasaan yang baru atas pemahaman yang didapatkan oleh para aktor dari dunia luar atau bisa jadi sebagai penemuan baru yang ada dalam isi kepala mereka tentang bagaimana cara mendapatkan suara rakyat.

Nilai *Sipakalebbi'* identik dengan puji-pujian. Yang berarti sesama manusia senantiasa saling memuji satu sama lain dan saling menghargai demi menjaga keharmonisan kehidupan sehari-hari. Manusia biasa tidak dapat dipisahkan dengan hati nurani, yang senantiasa menyenangkan segala hal yang berbau dengan keindahan baik berupa barang hingga kata-kata atau pujian. Mengakui kelebihan orang lain serta

⁸ Sebagai seorang raja yang memiliki kekuasaan, sebagai seorang pemimpin tentunya memiliki tanah yang luas sebagai modal ekonomi yang dimilikinya. Sehingga hal yang lumrah ketika seorang pemimpin itu meski memiliki modal ekonomi yang kuat sebagai dasar untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia mampu untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang dipimpinya.

kekurangan diri sendiri, dan menerima semua keadaan itu dengan hati yang terbuka serta saling menutupi kekurangan masing-masing atau saling bahu membahu dalam segala kegiatan merupakan bentuk penghargaan terhadap satu sama lain.

Namun dalam berkontestasi di arena pilkada hadirnya *black campaign* sejatinya telah menodai kampanye etis yang jauh dari pemakzulan norma sosial. Namun hal inilah justru kebanyakan terjadi dalam berkontestasi di arena pilkada saling menuding dan menjatuhkan antar calon sering dijadikan amunisi dalam menjatuhkan lawan politiknya. Meskipun yang menjadi lawan politiknya adalah keluarga sendiri. Hal inilah yang terjadi antar kandidat pada saat pemilukada di Pinrang tahun 2013 yang lalu dimana Andi Aslam Patonangi merupakan saudara ipar dan atau sepupu dari Andi Irwan Hamid, serta Andi Kaharuddin sendiri pun adalah kerabat dari Andi Aslam namun yang terjadi masing-masing kubu saling melemparkan amunisi seperti ketidakbecusan serta keterlibatan korupsi yang dilakukan oleh Andi Aslam pada saat menjadi Bupati. Hal inilah yang senantiasa beredar di media pada saat kampanye lalu.

Lebih lanjut nilai *sipakainge'* ini diperlukan dalam kehidupan kita karena bertujuan untuk saling mengingatkan, memberikan masukan baik berupa kritik dan saran satu sama lain. Mengingat kita sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kekhilafan dan dosa sehingga sebagai manusia yang hidup dalam struktur masyarakat diharapkan saling mengingatkan ketika kita melakukan tindakan yang diluar norma dan etika yang ada. Kritik dan saran ini tentunya dibutuhkan untuk melakukan perbaikan atas kesalahan dan kekurangan yang dilakukan. Misalnya saja para pemimpin yang telah melakukan kesalahan, maka masyarakat berkewajiban untuk mengingatkan pemimpin mereka bahwa pemimpin ini bersikap diluar norma dan etika. Seorang pemimpin juga harus lapang dada untuk menerima kritikan dan saran dari masyarakat. Namun yang terjadi ketika terdapat pendukung yang notabene PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tidak mendukung sang *incumbent* ini mendapatkan *punishment* berupa mutasi. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan konsep demokratis sendiri yakni

kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan politik. Penyimpangan yang terjadi tentunya tidak mampu untuk dihapuskan karena *phobia* akan sistem mutasi tersebut.

Alhasil reproduksi makna atas nilai *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* dalam upaya memobilisasi massa di arena pilkada tentunya secara tak kasat mata telah menghipnotis masyarakat untuk menentukan pilihannya. Kontestasi sengit yang dimenangkan oleh *incumbent* ini telah menunjukkan reproduksi nilai-nilai tersebut diatas dimana pada masa kepemimpinan sebelumnya Andi Aslam Patonangi mendapatkan suara terbanyak⁹ dibandingkan rival-rivalnya. Kemenangan tersebut beliau utarakan sebagai hasil dari kepemimpinannya selama ini yang tetap memperlakukan rakyatnya sesuai dengan adat atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Rekonstruksi habitus pun terjadi dengan adanya reproduksi makna dari nilai-nilai kebudayaan Bugis Makassar (Baca: *Sipakatau*, *Sipakalebbi* dan *sipakainge*) pun dilakukan oleh elit lokal dalam berkontestasi di arena pilkada. Hal ini dianggap sebagai taktik jitu dalam memobilisasi massa dimana masyarakat dibentuk untuk tetap patuh dan tunduk terhadap sang pemimpin.

D. Kesimpulan

Berbagai taktik dalam memobilisasi massa yang dilakukan oleh elit lokal dalam berkontestasi di arena pilkada tidak terlepas dari penyebaran wacana yang mengandung unsur lokalitas dan kebudayaan. Kampanye merupakan momentum politik sehingga tak jarang nilai-nilai lokal yang direkonstruksi oleh elit lokal ini cenderung dimanfaatkan untuk memobilisasi massa. Lokalitas kembali disajikan di tengah masyarakat untuk membangun kepercayaan diri serta tingkah laku masyarakat dalam menentukan pilihan.

⁹ Pada Pilkada Pinrang tahun 2013 kemarin perolehan suara masing-masing pasangan adalah: Andi Aslam Patonangi dengan Darwis Bastama (A2P Berdarma) memperoleh suara sebanyak 60.251 (31,04 %); Andi Irwan Hamid dengan Andi Mappanyukki (IDAMAN) memperoleh suara sebanyak 52.521 (27,05 %); Abdullah Rasyid dengan Faisal Tahir Syarkawi (Idola Fathir) memperoleh suara 44.981 (23,14 %); Andi Kaharuddin Machmud dengan Ardan AP (AKBAR) memperoleh suara sebanyak 12.740 (6,56 %); H. Sulthani dengan Rivai Mana (SuaRa) memperoleh suara sebanyak 12.440 (6,41 %); Suryadi dengan Sahabuddin Toha (KOPASUS) memperoleh suara sebanyak 11.269 (5,80 %).

Terkait dengan pemikiran Foucault akan pengetahuan yang memiliki kekuasaan dalam membentuk perilaku individu terlihat oleh strategi para elit dalam melakukan kampanye, walaupun pengetahuan akan nilai-nilai kebudayaan lokal yang telah disepakati sejak dulu diketahui oleh para elit, tapi tetap saja mereka cenderung mempraktekkan nilai-nilai baru yang dimiliki oleh para elit itu sendiri terlepas dari nilai-nilai budaya lokal dalam struktur masyarakat. Kampanye yang bermuatan nilai-nilai politik etis justru tidak dihiraukan, tetapi mereka cenderung mempraktekkan kampanye hitam yang mengandung unsur saling menjatuhkan satu sama lain hingga berujung pada pembunuhan karakter masing-masing calon sebagai senjata utama para elit ataupun tim sukses masing-masing kubu.

Strategi dalam memobilisasi massa di arena pilkada sejatinya terdapat beberapa hal yang perlu dipahami yakni: *Pertama*, Penyebaran kuasa wacana atas nilai-nilai kebudayaan Bugis Makassar dimanfaatkan oleh elit lokal dalam rangka momentum suksesi politik. Motif penghidupan wacana nilai-nilai lokal ini (Baca: *sipakatau*, *sipakainge*, dan *sipakalebbi*) ini dimotori oleh elit lokal untuk merekonstruksi pikiran masyarakat dalam menentukan pilihan serta sikap politiknya. *Kedua*, habitus masyarakat selama ini yang sesuai dengan aturan atau norma-norma kebudayaan Bugis Makassar direkonstruksi oleh elit lokal sesuai dengan tujuan mereka untuk tetap eksis dan survive di panggung politik. “Yang layak untuk menjadi pemimpin hanyalah berasal dari kalangan bangsawan” merupakan doktrin yang selama ini ada di masyarakat Pinrang sebagai bukti kepercayaan dan kesetiaan mereka terhadap kepemimpinan seorang bangsawan, dimana pola patron-klien masih kuat pada masyarakat tersebut. *Ketiga*, Reproduksi makna atas nilai *sipakatau*, *sipakainge*, dan *sipakalebbi* pada saat berkontestasi di arena pilkada menjadi amunisi bagi setiap kubu yang tengah berkontestasi dalam memobilisasi massa meski dalam praktiknya jauh dari makna yang sesungguhnya. Para elit ini justru tidak mencerminkan sejatinya praktik politik etis, dimana hadirnya *black campaign* dan *money politik* sebagai anomali perpolitikan saat ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan Bugis Makassar.

Keempat, tidak jelasnya batasan dan atau makna sesungguhnya dari nilai tersebut sehingga para elit tertentu leluasa dalam mereproduksi dan memanfaatkan wacana nilai lokalitas yang dimiliki oleh masyarakat Bugis Makassar dalam meraup keuntungan. Praktik pergeseran nilai tak terhindarkan tatkala generasi saat ini yang awam akan makna nilai lokal tersebut justru secara elegant terhegemoni dan dikonstruksi oleh nilai-nilai baru yang menghasilkan habitus baru bagi masyarakat kini. Untuk itu diperlukan adanya koreksi terhadap pemahaman atas konstruksi dari nilai-nilai kebudayaan Bugis Makassar saat ini sesuai dengan makna sesungguhnya yang dipadukan dengan perkembangan zaman.

Nilai-nilai kebudayaan yang seharusnya mampu membentuk etika dan perilaku masyarakat termasuk para elit ternyata tidak tercermin bahkan tersingkirkan oleh berbagai kepentingan politik. Para elit politik yang seharusnya mampu mengaktualisasikan nilai budaya lokal masyarakat Bugis Makassar yakni *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi'* ternyata cenderung mengabaikan nilai kebudayaan ini, demi mendapatkan kekuasaan dan memenuhi kepentingannya. Para elit yang bertarung dalam panggung politik ini seringkali melakukan *black campaign* (kampanye hitam) atau yang kita kenal dengan istilah *pembunuhan karakter*, sedangkan hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep budaya yang dianut oleh masyarakat bugis Makassar. Ketika *pembunuhan karakter* ini dijadikan alat untuk berkompetisi dan meraih dukungan masyarakat artinya para elit politik ini tidak lagi mencerminkan sikap saling menghormati, menghargai satu sama lain.

DAFTAR BACAAN

- Agger, Ben, *Teori Sosial kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Ahimsa, Heddy Shri dan Putra, 2007, *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*, Yogyakarta, Kepel Press.
- Foucault, Michel, 2007, *Order Of Thing “Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel, 2011, *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Michel Foucault terjemahan dari Aesthetic, Method, and Epistemology: Essential Works Of Foucault 1954-1984*, Yogyakarta, Jalasutra.
- Foucault, Michel, 2012, *The Archaeology of Knowledge (terjemahan)*, Yogyakarta, IRCiSoD.
- Jenkins, Richard, 2004, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Mattulada, 1985, *Satu Lukisan Antropologi Politik Orang Bugis*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Poelinggomang, Edward L, 2004, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*, Yogyakarta, Ombak.
- Rahim, A.Rahman, 2011, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Yogyakarta, Ombak.
- Sutrisno, Mudji dan hendar Putranto, 2005, *Teori-teori Kebudayaan*, Yogyakarta, Kansius.
- Zuhro, R Siti, 2009, *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambunan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Yogyakarta, Ombak.

Media Internet

- <http://www.tribunnews.com>. 19/10/2012 diakses pada tanggal 05/02/2013.
- <http://m.beritakotamakassar.com/index.php/politik/6253--pinrang-masih-butuh-sosok-aslam-patonangi.html>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2013).
- <http://makassar.tribunnews.com/2013/09/23/penetapan-bupati-pinrang-dijaga-675-aparat-polisi.htm>. Diakses pada tanggal 19 November 2013.